



### **Gereja Kalimantan Evangelis Menyikapi Proyek Ibu Kota Negara Baru**

**Sudianto<sup>1</sup>, Kinurung Maleh<sup>2</sup>, Hadi Saputra<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis, [sudianto@stt-gke.ac.id](mailto:sudianto@stt-gke.ac.id)

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis, [kinurungmaleh@stt-gke.ac.id](mailto:kinurungmaleh@stt-gke.ac.id)

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis, [hadisaputra@stt-gke.ac.id](mailto:hadisaputra@stt-gke.ac.id)

#### **Abstract**

*Indonesian President Joko Widodo plans to relocate the National Capital (hereinafter IKN) to East Kalimantan in 2019. The Kalimantan Evangelical Church (GKE), as one of the ecclesiastical organizations in Kalimantan, has a very positive and anticipatory reaction to the government's decision. The research in this paper describes the process of relocating a new IKN in East Kalimantan, how GKE's attitude towards the IKN project is, and the theological reflection of GKE services in the IKN area. The research method used is a qualitative method to describe the data collected. The type of research is descriptive, with data collection by interview method. The presence of the new IKN in East Kalimantan was responded to in a very positive way by GKE. There was an opportunity to be seen there, where East Kalimantan and the location of IKN were in direct contact with GKE. The Synod level already has a basis where there is a "Blueprint" for the formation of GKE preparations for the new IKN, so that the basis for strengthening the position of GKE in the new IKN is clear. The development of the GKE congregation in response to the formation of a new IKN is a continuous process. Observation, strengthening commitment to change, preparing and conducting research, problem analysis, theological reflection, and continuous strategic planning in evaluation. Developing the Medium-Term and Long-Term GKE Projects in the New IKN so that the presence and development of GKE there becomes a lighthouse project of God's church in the future.*

*Keywords: IKN, GKE, Social Change, Functional Theory.*

#### **Abstrak**

Presiden Indonesia Joko Widodo merencanakan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan pada tahun 2019. Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) sebagai salah satu organisasi Kegerejaan di Kalimantan memberikan reaksi yang sangat positif dan antisipatif atas keputusan pemerintah tersebut. Riset dalam tulisan ini Mendeskripsikan proses pemindahan IKN di Kalimantan Timur, bagaimana sikap GKE terhadap proyek IKN, dan refleksi teologis pelayanan GKE di wilayah IKN. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif untuk mendeskripsikan setiap data yang dikumpulkan. Jenis penelitian yaitu deskriptif, Pengumpulan data dengan metode wawancara. Kehadiran IKN yang baru di Kalimantan Timur, ditanggapi dengan cara yang sangat positif oleh GKE, ada peluang yang dilihat disana dimana Kalimantan Timur dan lokasi IKN bersentuhan langsung dengan GKE. Untuk tingkat Sinode sudah memiliki dasar dimana ada "Cetak Biru" dari pembentukan persiapan GKE untuk IKN baru sehingga landasan untuk memperkuat posisi GKE di IKN baru sudah jelas arahnya. Pembangunan jemaat GKE dalam

menyikapi terbentuknya IKN baru adalah proses yang berlangsung secara berkesinambungan. Pengamatan, penguatan komitmen untuk berubah, mempersiapkan dan melakukan penelitian, analisis masalah, refleksi teologis dan perencanaan strategis yang berkelanjutan dalam evaluasi. Mengembangkan Proyek GKE Jangka Menengah dan Jangka Panjang di IKN baru sehingga kehadiran dan pengembangan GKE di sana menjadi proyek mercusuar gereja Tuhan ke depan.

Kata Kunci : IKN, GKE, Perubahan Sosial, Teori Fungsional.

## **Pendahuluan**

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari pulau Jawa ke Kalimantan tentu saja membuat masyarakat Kalimantan berbenah dan mempersiapkan diri, walaupun isu mengenai pemindahan ibu kota sendiri sudah sering terdengar sejak lama, sejak era Presiden Soekarno. Pada tanggal 18 Januari 2022, dengan disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) oleh Dewan Perwakilan Rakyat menandakan bahwa pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke wilayah Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sudah sah secara hukum. Proses pemindahan akan berlangsung secara bertahap dari tahun 2024. Pemindahan ibu kota negara tentu saja bukan hanya sekedar berpindahnya pusat pemerintahan hal tersebut akan berpengaruh kepada perubahan sosial, budaya, ekonomi, politik, ekologi dan agama.

Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) sebagai salah satu organisasi Kegerejaan terbesar di Kalimantan memberikan reaksi yang sangat positif dan antisipatif atas keputusan pemerintah tersebut. Wakil Ketua Umum Majelis Sinode GKE Kinurung Maleh (Sudianto dan Hadi Saputra, 2022b) mengatakan bahwa Majelis Sinode GKE telah melakukan beberapa program. Pertama, mengadakan beberapa seminar di tingkat Sinodal mengenai kesiapan GKE atau gereja dalam menyambut IKN baru. Kedua, percepatan pengembangan resort dan jemaat GKE di wilayah Kalimantan Timur seperti pemekaran resort-resort baru dan penetapan jemaat Semoi di Resot Balikpapan. Ketiga, menyiapkan Program Strategis Tingkat Sinode seperti pembuatan *blue-print* pengembangan GKE di IKN termasuk memperoleh tanah bagi GKE.

Ketua Resort GKE Samarinda, Pdt. Andrian K. Iriawan menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang dipersiapkan dalam menyikapi kehadiran IKN di Kalimantan Timur. GKE Samarinda berupaya meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan dengan mengingat bahwa ada banyak gereja mapan dan memiliki daya tarik merupakan tantangan bagi GKE. Kenyataan di lapangan ditemukan bahwa ada beberapa mahasiswa GKE yang menuntut pendidikan di kota Samarinda dan juga jemaat GKE memilih bergabung dan beribadah di gereja non GKE. Realitas ini harus dibenahi, agar ketika IKN berdiri GKE sudah mampu dalam melayani warga jemaatnya. Tantangan ini juga ditambah dengan adanya 170 gedung gereja yang ada di Kota Samarinda sedangkan GKE sendiri hanya memiliki dua gedung Gereja (Data BAMAGNAS -Badan Musyawarah Gereja Nasional; Sudianto dan Hadi Saputra, 2022a).

Upaya GKE dalam menyikapi proyek pemindahan IKN tentu saja tidak hanya sebatas bagaimana memetakan posisi GKE di tengah pembangunan IKN tetapi bagaimana

GKE bisa berkiprah dan menjadi bagian dari perkembangan IKN secara utuh dan menyeluruh. GKE juga dipanggil dan diutus untuk bagaimana memberdayakan anggota jemaat agar bisa baik menikmati manfaat pemindahan IKN maupun bersikap kritis terhadap perubahan yang dapat merugikan warga jemaat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses pemindahan (pembentukan) IKN di Kalimantan Timur, sikap MS, MR dan MJ GKE terhadap proyek IKN, dan refleksi teologis pelayanan GKE di wilayah IKN.

Penelitian ini menggunakan teori fungsional dari Emile Durkheim (Jones, 2003) akan diterapkan dalam menelaah situasi yang diakibatkan oleh proyek IKN baru ini dan bagaimana GKE menyikapinya. Teori fungsional Durkheim berfokus kepada bagaimana melihat interaksi makhluk sosial dengan lingkungan sosial dimana dia berada. Pendekatan yang sama juga dilakukan oleh Talcott Parsons (Wirawan, 1991) yang menekankan bahwa teori fungsional berbicara mengenai adaptasi terhadap perubahan dan juga fungsi integrasi kelompok agar memperkuat posisi di tengah masyarakat sosial. Penulisan ini juga melihat pembentukan IKN baru dan perubahan sosial yang menyertainya, sehingga pendekatan dengan teori sosial dianggap sangat relevan dalam melihat posisi lembaga agama seperti GKE dalam menyikapi proyek jangka panjang pemerintah yaitu IKN Baru di Kalimantan Timur.

## **Metode**

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan setiap data yang dikumpulkan. Fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian berupa perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan yang akan diamati, dan wawancara akan menghasilkan data secara tertulis maupun lisan (Moleong, 2007). Jenis penelitian yaitu deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa gambar dan kata-kata yang berasal dari naskah wawancara, catatan di lapangan, foto, rekaman audio, memo dan dokumen resmi lainnya dari objek penelitian (Moleong, 2007).

Pengumpulan data dengan metode wawancara merupakan suatu proses percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu untuk mendapatkan jawaban. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, Peneliti sebagai pewawancara dan informan sebagai terwawancara. Wawancara yang diterapkan yaitu model tidak terstruktur: pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu guna menyesuaikan keadaan dan ciri dari responden (Moleong, 2007). Peneliti juga akan mewawancarai informan baik secara tatap muka dan *online* via *WhatsApp* sebagai penerapan penelitian dimasa pandemi COVID-19 ini agar wawancara berjalan dengan baik dan lancar. Informan yang diwawancarai yaitu para Ketua Resort dan MPH Sinode GKE.

Peneliti akan mengadakan pengamatan untuk pengumpulan data yang tertuju kepada suatu peristiwa atau kejadian tertentu yang dilakukan secara langsung terhadap suatu kondisi atau situasi tertentu, benda, proses, dan perilaku yang akan diteliti (Faisal, 2003). Peneliti akan melakukan penelitian di lapangan (Yusuf, 2016) dengan melakukan

observasi terhadap kondisi kegiatan dan situasi resort dan gereja serta kota dan lahan sekitar area IKN pada bulan Mei 2022.

Analisis data dilakukan agar memudahkan Peneliti menyusun hasil dari pengumpulan data (Sugiyono, 2008). Langkah-langkah analisis yang diterapkan yaitu: *Data Reduction* (Reduksi Data): adalah merangkum, memilih hal-hal inti, memfokuskan hal yang penting, mencari tema serta pola. *Data Display* (Penyajian Data): adalah uraian singkat yang sesuai dengan urutan sehingga mudah dipahami, termasuk menarik kesimpulan singkat dan tindakan selanjutnya *Conclusion Drawing/Verification* adalah penarikan kesimpulan dari data yang dianggap valid dan objektif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Jalan Panjang Pembentukan IKN Baru***

Fondasi awal pembentukan IKN disampaikan oleh bapak pendiri bangsa yaitu Presiden Soekarno yang menggagas pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangka Raya, saat meresmikan kota tersebut sebagai ibu kota Kalimantan Tengah di tahun 1957. Kemudian pada era Orde Baru, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Dimaksudkan awalnya untuk pusat pemerintahan Indonesia. Pada Era Reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 menyodorkan dua skenario. Pertama mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota namun direncanakan dan dibangun secara benar-benar, atau yang ke dua memindahkan Pusat Pemerintahan keluar dari Jakarta.

Presiden Joko Widodo merencanakan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan pada tahun 2019 yang disampaikan di depan anggota MPR. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia dari Fraksi Golkar (Golongan Karya), dalam rapat kerja dengan pemerintah menyepakati bahwa Ibu Kota Negara yang baru itu diberi nama Nusantara, yang disahkan oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah mendapat persetujuan secara aklamasi pada Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang 2021-2022.

### ***Faktor-Faktor Relokasi Ibu Kota Negara***

Ada berbagai faktor yang menjadi pertimbangan perlunya relokasi IKN. Faktor sosial, ekonomi, politik, lingkungan hidup, dan keamanan merupakan aspek penting relokasi IKN dari Jakarta di pulau Jawa. Kepadatan penduduk yang tidak merata dan kecenderungan untuk berkonsentrasi di Pulau Jawa merupakan faktor utama relokasi. Ketimpangan pemerataan penduduk telah menyebabkan ketimpangan dan stagnasi ekonomi. Sekitar 57,4% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan persebaran penduduk di Sumatera yaitu 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Kalimantan 5,81%, Sulawesi 7,31%, Maluku dan Papua 2,61%. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa berdampak kepada konsentrasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di Pulau Jawa, dan sebaliknya tertinggal dengan wilayah lain.

Aspek lain dari Pemindahan IKN ke luar Jawa yaitu bertujuan untuk mengurangi beban ekologis kota Jakarta yang sudah sangat berat. Jakarta mengalami penurunan daya

lingkungan yang menyebabkan kerugian ekonomi: polusi udara, penurunan permukaan tanah, banjir dan rusaknya sumber air bersih. Faktor-faktor negatif ini menyebabkan Jakarta hampir tidak layak disebut sebagai ibu kota negara Indonesia. Faktor-faktor ekologis menjadi pertimbangan penting perlunya pemindahan IKN ke pulau Kalimantan. Selaras dengan itu, potensi bencana alam gempa bumi juga menjadi pertimbangan perlunya IKN baru di Pulau Kalimantan yang bebas gempa dengan kondisi alam yang masih hijau dan udara yang lebih sehat.

Tekad pemindahan IKN bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia, dan membangun sebuah kota futuristik yang ekologis dan sehat. Proyek IKN juga akan berbasis kepada pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan IKN yang sejalan dengan jati diri bangsa. Ibukota baru yang berada di sebagian wilayah dari dua kabupaten: Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kertanegara (KuKar) memiliki lima visi: sebagai lambang identitas nasional, kota yang cerdas (*smart*), hijau (*green*), asri (*beautiful*) dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan standar modern dan internasional. IKN baru juga mempraktikkan tata kelola yang efisien dan efektif serta sebagai motor penggerak pemerataan ekonomi di kawasan timur (Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Baru, Fakultas Ilmu Sosial Politik – Universitas Indonesia, n.d).

#### ***Kriteria, Zona Dan Fungsi Ibu Kota Negara***

BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dalam buku saku IKN menuangkan beberapa dasar dan kriteria pemilihan provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah IKN baru (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021):

1. Tersedianya lahan luas milik pemerintah atau BUMN, untuk menghemat anggaran bagi pengadaan lahan. Kalimantan Timur memiliki lahan luas, berstatus Hutan Produksi (HP) dan Perkebunan
2. Lokasi, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia, merepresentasikan keadilan. Kalimantan Timur berada di jalur ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia - Selat Makassar).
3. Potensi konflik sosial rendah, memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Struktur kependudukan heterogen dan terbuka, dengan sistem pertahanan didukung oleh Tri Matra Darat, Laut, Udara.
4. Wilayah minimal terhadap bencana alam, Kalimantan Timur aman dan minim ancaman bencana alam.
5. Daya dukung tanah dan air baku yang tinggi: Air baku dari 3 waduk eksisting, 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai, dan 4 daerah aliran sungai
6. Berada dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur dan aksesibilitas lokasi tinggi karena dekat dengan dua kota besar: Balikpapan dan Samarinda

BAPPENAS telah memetakan bahwa pembangunan IKN terdiri atas empat zona yang meliputi:

1. Zona-1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan terdiri dari Istana Kepresidenan dan Kantor Lembaga Negara, (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) yang dikembangkan pada lahan seluas 2.000 Ha.
2. Zona-2 Kawasan Ibu Kota Negara dengan peruntukan sebagai fungsi pendukung dan penunjang kawasan inti pusat pemerintahan dikembangkan dari kawasan sebelumnya menjadi seluas 40.000 Ha
3. Zona-3 Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara I merupakan pengembangan zona IKN dengan fungsi ruang utama untuk pengembangan kawasan dengan luas 200.000 Ha
4. Zona-4 Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara II merupakan perluasan dari zona sebelumnya dengan cakupan kota metropolitan dengan luas lebih dari 200.000 Ha.

BAPPENAS juga telah menetapkan bahwa fasilitas dalam setiap kawasan mewakili prioritas pembangunan berdasarkan zona kawasan yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya dengan rincian sebagai berikut:

1. Fungsi Utama: agenda utama dari pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) adalah pemindahan lokasi pusat pemerintahan. Dengan demikian, gedung pemerintahan sebagai sarana operasional serta pusat aktivitas dari sebuah pusat pemerintahan merupakan komponen utama dari investasi fisik yang dibangun. Rincian fasilitas yang akan di bangun meliputi: a) Istana Kepresidenan; b) Bangunan Strategis TNI/POLRI; c) Kantor Lembaga Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif).
2. Fungsi Pendukung. Fungsi untuk menyediakan sejumlah fasilitas pendukung yang perlu disiapkan untuk menunjang aktivitas pusat pemerintahan yang akan dibangun. Rincian fasilitas yang akan di bangun meliputi: a) Perumahan ASN; b) Perumahan Non ASN; c) Sarana Pendidikan: SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi; d) Sarana Kesehatan: Puskesmas & Rumah Sakit; e) Fasilitas Keamanan Lingkungan.
3. Fungsi Penunjang. Pembangunan prasarana dan fasilitas umum diperlukan untuk menunjang seluruh aktivitas untuk memfasilitasi kelancaran dan kemudahan aktivitas masyarakat sehari-hari. Rencana fasilitas-fasilitas penunjang yang akan dibangun meliputi: a) Infrastruktur Penunjang: Jaringan jalan, instalasi pengolahan limbah terpadu, sistem penyediaan air minum, sistem persampahan, sistem drainase perkotaan, dan saluran *ducting* untuk jaringan telekomunikasi; b) Jaringan transmisi dan distribusi listrik: PLTU Batubara; c) Perbaikan kapasitas bandara serta pelabuhan, dan jalan tol.

### ***Eksistensi GKE di IKN sebagai Lembaga Agama***

Penulisan ilmiah ini diberi topik Gereja Kalimantan Evangelis (selanjutnya disebut GKE) menyikapi Ibu Kota Negara (IKN). Pemilihan topik ini didasarkan kepada realitas bahwa banyak elemen masyarakat, termasuk institusi agama, yang antusias untuk hadir di wilayah IKN. Nahdatul Agama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), dan beberapa denominasi dan sinode datang untuk mendapat tanah sebagai pusat atau perluasan pelayanan. Beberapa misi luar negeri seperti *United Evangelical Mission* (UEM berpusat di Jerman) dan Lembaga Misi Korea Selatan juga

datang ke wilayah IKN untuk mencari lokasi dalam rangka menyediakan dan mengembangkan tempat pelayanan (Sudianto, 2022a).

GKE sebagai lembaga agama yang berasal atau berada di pulau Kalimantan atau sebagai “Tuan Rumah” perlu diketahui dan dikaji bagaimana kesiapannya dalam menyambut kehadiran IKN. Dalam upaya memahami dan mengkaji kesiapan GKE dan bagaimana sikap GKE terkait proyek IKN, peneliti memilih sampel MPH Sinode GKE yang berkedudukan di Banjarmasin, tiga Resort GKE, satu Calon Resort yang berada di wilayah sekitar IKN. Tiga resort tersebut yaitu Balikpapan, Samarinda dan Mahakam, serta Calon Resort GKE Sendawar. Pemilihan Resort dan Calon Resort tersebut dengan pertimbangan karena berimpitan langsung dengan Titik Nol IKN atau berada pada jarak terdekat dengan IKN.

Keberadaan GKE di wilayah IKN terwakili melalui keberadaan Resort-resort dan jemaat-jemaat GKE di Kalimantan Timur. Berdasarkan Almanak Nast GKE Tahun 2022, ada 3 resort dan 2 calon resort GKE di wilayah Kalimantan Timur yaitu. Resort GKE Balikpapan, Resort GKE Mahakam, Resort GKE Samarinda, Calon Resort GKE Sendawar, dan calon Resort GKE Sangatta. Satu Resort dan dua calon Resort yang disebutkan terakhir, dimekarkan pada Sinode Umum GKE XXIV di Kuala Kurun tahun 2021(Majelis Sinode GKE, 2022). Pemekaran resort-resort ini sendiri sebagai respons terhadap proyek IKN di wilayah ini.

### ***MPH MS GKE Menyikapi IKN***

MPH Sinode GKE menyikapi kehadiran IKN sebagai sebuah kesempatan dan tantangan. Kesempatan dan tantangan karena GKE menyadari sejumlah tujuan, nilai, dan dampak baik bersifat positif dan negatif. Kehadiran IKN di Kalimantan disambut dan disikapi secara positif karena berada di wilayah pelayanan GKE, namun juga was-was dengan kehadiran jutaan orang dengan dampak sosial budaya, ekonomi, dan ekologi. Bagaimanapun realitas dan dampaknya, GKE sebagai lembaga gereja Protestan tertua dan terbesar di Kalimantan harus menunjukkan identitas dan kiprahnya sebagai tuan rumah IKN.

Sejak pidato (baca: pengumuman) Presiden Joko Widodo bahwa Kalimantan Timur sebagai wilayah IKN, GKE telah meresponsnya dengan berbagai cara. Sidang-sidang pada tingkat Sinode telah membahas dan merekomendasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan bagi kiprah GKE dalam menyambut IKN. Pada akhir tahun 2019, GKE pertama kali mengadakan Seminar “Kesiapan GKE menyambut IKN” di Christian Center Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Pembicara utama yaitu Ketua Umum MS GKE, Pdt. Dr. Wardinan, dan Wakil Ketua DPD RI, Dr. Teras Narang. Kegiatan ini dihadiri oleh ketua badan, lembaga dan resort GKE. Kegiatan dan tema yang sama juga dilakukan pada tahun 2020 GKE bekerja sama dengan PIKI (Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia) di Palangka Raya dengan pembicara Dr. Alue Dohong, Wakil Menteri Lingkungan hidup, dan Dr. Teras Narang, Wakil Ketua DPD RI (Kinurung Maleh, 2022b) .

Berdasarkan berbagai Seminar, pertemuan dan Sidang di tingkat Sinode dan Resort, Majelis Sinode menetapkan kerangka umum kesiapan dan partisipasi GKE dalam Garis-Garis Besar Tugas Panggilan Gereja Kalimantan Evangelis 2015-2040 dan 2021-2026 khususnya pada BAB III “Visi dan Misi GKE.” GBTP tersebut menyatakan bahwa GKE MENYIAPKAN PERANGKAT, SISTEM DAN PELAYANAN DI IBUKOTA NEGARA BARU DAN SEKITARNYA, yang dijabarkan dalam enam (6) poin (MS GKE, 2021b):

1. GKE menyusun "cetak biru" (*blue print*) perencanaan, strategi dan tahapan pengembangan pelayanan di IKN.
2. GKE membentuk tim kerja khusus menindaklanjuti "cetak biru".
3. GKE melalui Sinode Umum XXIV GKE tahun 2021, memberikan dispensasi kepada Resort, Calon Resort, Jemaat, Calon Jemaat dan Pos Pelayanan di sekitar wilayah IKN untuk GBTP GKE 2021-2026 untuk peningkatan status kelembagaan dalam rangka mempercepat proses penyiapan pelayanan di IKN baru.
4. GKE bergandengan tangan untuk menopang seluruh proses penyiapan pelayanan di IKN baru, baik pikiran dan tenaga, maupun motivasi dan dana.
5. GKE melakukan berbagai pendekatan kepada pihak pemerintah dalam mengusahakan lahan dan fasilitas untuk kegiatan keagamaan di pusat IKN.
6. GKE menyeleksi dan menempatkan tenaga-tenaga pekerja yang visioner, berdedikasi, pekerja ulet, komunikator, terampil dan mampu mengembangkan wilayah pelayanan sesuai *roadmap* "cetak biru".

Secara khusus untuk menindak lanjuti poin tiga (3) di atas maka ditetapkan keputusan Sinode Umum XXIV GKE No: 17 dan 18/SU-XXIV/GKE/07/2021 tentang Pengesahan Resort Persiapan GKE menjadi resort dan calon resort GKE (MS GKE, 2021a). Keputusan tersebut yaitu menerima dan mengesahkan 2 Resort Persiapan menjadi Resort dan 18 Resort Persiapan menjadi Calon Resort. Resort dan Calon Resort GKE diterima dan disahkan yang ada dalam kawasan IKN:

1. Resort Persiapan GKE Samarinda menjadi Resort Samarinda berkedudukan di Samarinda, Kalimantan Timur. Resort Samarinda mendapat keistimewaan status karena tanpa melewati Calon Resort langsung menjadi Resort Definitif.
2. Resort Persiapan GKE Sendawar (Pemekaran dari Resort GKE Mahakam) menjadi Calon Resort GKE Sendawar, berkedudukan di Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat-Kaltim.
3. Resort Persiapan GKE Sangatta (Pemekaran dari Resort GKE Balikpapan) menjadi Calon Resort GKE Sangatta Selatan, berkedudukan di Kec. Sangatta, Kab. Kutai Timur-Kaltim.
4. Resort Persiapan GKE Banjarbaru di Kalimantan Selatan yang dikategorikan sebagai wilayah penopang IKN juga mendapat kekhususan langsung menjadi Resort Banjarbaru. Bersamaan dengan penetapan Resort dan Calon Resort, Majelis Sinode juga mengutus tenaga-tenaga kreatif dan ulet untuk mengembangkan GKE di wilayah IKN.

GKE berusaha memperoleh lahan yang memadai untuk pengembangan GKE di sekitar IKN. Pada akhir tahun 2021, GKE memperoleh hibah 6 Ha tanah dari warga GKE yang murah hati, setia dan memiliki kedudukan yang strategis di pemerintahan. Bersamaan dengan itu GKE mengajak mitra ekumenis UEM (*United Evangelical Mission*) di Jerman untuk melihat potensi dan mengembangkan GKE di wilayah IKN. Dua kali utusan UEM, termasuk Sekretaris Jenderal Volker Martin Daily, telah tiba di wilayah IKN pada tahun 2022 untuk melihat potensi pelayanan GKE dan UEM sendiri. Atas dasar *sharing* lahan dan pengembangan sosial-budaya dan ekonomi berkelanjutan (ekologis), GKE dan UEM akan mengembangkan kekristenan yang kontekstual di wilayah IKN. Pada masa selanjutnya, MS GKE juga akan terus mengadakan berbagai program kerja sama baik dengan pemerintah dan mitra gereja maupun lembaga sosial dan adat untuk pengembangan GKE di IKN (Kinurung Maleh, 2022a).

Memperhatikan kebijakan, program dan visi GKE terhadap kehadiran IKN di atas, MS sudah memberikan respons positif dan konstruktif. Di satu sisi GKE menyadari dan menyikapi kehadiran jutaan pendatang dengan perbedaan latar belakang, dan dampak negatif sosial-budaya dan ekologis, pada sisi lain GKE telah dan akan mengambil kesempatan untuk berkiprah mewujudkan damai sejahtera bagi masyarakat dan seluruh ciptaan. GKE sebagai Gereja yang diutus Tuhan di Kalimantan memiliki potensi besar menjadi agen perubahan dan kemajuan dalam proyek pembangunan IKN demi kemajuan bangsa Indonesia (Kinurung Maleh, 2022b).

### ***Majelis Resort GKE Menyikapi Kehadiran IKN***

#### ***Calon Resort Sendawar***

Sikap Majelis Calon Resort Sendawar terhadap kehadiran IKN dapat ditelaah dalam Program Kerja Resort Sendawar Tahun 2022. Dalam bagian C. PROGRAM OIKUMENE DAN HUBUNGAN KE PEMERINTAH, dipaparkan 4 poin penting yang seharusnya memiliki korelasi dengan partisipasi Calon Resort dalam menyambut IKN dengan cara, pertama, ambil bagian dalam kegiatan kerohanian yang diselenggarakan oleh pemerintah/ instansi pemerintahan/ PGI. Kedua, membentuk kelompok Tani Gereja,. Ketiga, proposal-proposal untuk menunjang perkembangan Calon Resort. Keempat, kesiapan lahan atau bangunan kantor Resort GKE Sendawar

Berdasarkan program kerja yang memiliki relasi langsung dengan partisipasi gereja dalam pembangunan negara, disimpulkan bahwa Calon Resort Sendawar tidak memiliki program bagi kehadiran IKN. Tidak ada satu program pun yang bersentuhan langsung bagi kesiapan Resort Sendawar menyikapi kehadiran IKN dengan berbagai dinamikanya. Namun demikian, program terkait usaha pertanian masih bisa dikembangkan oleh gereja dalam upaya kesiapan jemaat baik secara ekonomi dan ekologi menyambut IKN.

#### ***Resort Samarinda***

Resort Samarinda memiliki sikap yang lebih siap dan konstruktif terhadap kehadiran IKN. Kedudukan strategis GKE berada di ibu kota provinsi Kalimantan Timur

dengan posisi dan sumber daya warga jemaat yang baik telah membuka cakrawala gereja untuk terlibat dalam menyambut IKN. Program kerja Resort Samarinda tahun 2022 pada bagian C. BIDANG PELAYANAN DAN KESAKSIAN menyebutkan partisipasi GKE bagi kehadiran IKN Meningkatkan kualitas pelayanan untuk menyiapkan GKE menyambut IKN baru agar GKE Samarinda memiliki fasilitas pelayanan memadai untuk menjadi pilihan utama para pendatang apabila IKN telah pindah ke Kalimantan Timur

Berdasarkan Program Kerja Resort GKE Samarinda dapat disimpulkan ada kesiapan khususnya dalam mengupayakan adanya fasilitas yang diharapkan bisa membuat masyarakat yang beragama Kristen memilih gereja GKE sebagai tempat ibadah. Fasilitas ini akan berdampak pada dua hal yaitu pertama, sebagai upaya pemberitaan Kabar Baik agar orang tertarik dan betah beribadah dan bergereja di GKE, dan kedua, dengan kehadiran jutaan orang baru di wilayah IKN tidak membuat warga GKE lari atau berpindah ke gereja (Hadi Saputra, 2022).

#### *Resort Balikpapan.*

Resort GKE Balikpapan merupakan wilayah terdekat dengan IKN sehingga kehadiran IKN sangat berdampak bagi Resort. Kehadiran IKN menyebabkan wilayah pelayanan Resort menjadi terfokus ke beberapa jemaat saja. Dua jemaat dimekarkan menjadi Calon Resort yaitu Jemaat GKE Bontang dan Jemaat GKE Sangatta. Jemaat-jemaat Resort Balikpapan yang ada yaitu hanya Jemaat Balikpapan, Jemaat Semoi dan Jemaat Wilayah Pelayanan di Kilometer 23. Kemudian ada Wilayah Pelayanan GKE Manggar sebagai wilayah pelayanan yang baru.

Kehadiran IKN juga disikapi positif oleh Majelis Sinode dan Majelis Resort Balikpapan dengan menempatkan seorang pelayan/pendeta tetap di Jemaat GKE Semoi. Pelayanan di jemaat semakin efektif dan mampu menghadirkan Pemberitaan Kabar Baik (PKB) GKE bagi masyarakat. Membaca Program Kerja baik Resort GKE Balikpapan maupun Jemaat GKE Semoi, tidak ada satu program pun yang berbicara tentang kesiapan dan partisipasi dalam menyambut kehadiran IKN. Tidak ada upaya atau program untuk mengalokasi dana atau memiliki/membeli lahan bagi gereja di wilayah IKN, sedangkan Resort Balikpapan dan Jemaat Semoi merupakan gereja terdekat dengan wilayah IKN. Resort GKE Balikpapan hanya mengharapkan pemberian/hibah tanah (2Ha) dari Pdt. Analita Migang (Sudianto, 2022d).

Resort Balikpapan dan Jemaat GKE Semoi sebagai wilayah pelayanan paling dekat dengan IKN belum mempersiapkan diri untuk mengantisipasi kemajuan hadirnya IKN. Belum ada rencana matang untuk membuka Pos PI baru dengan alasan ketiadaan dana dan bahkan ibadah di sana harus mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Namun demikian, Jemaat Semoi masih berusaha mengupayakan kehadiran pelayanan dari PKB GKE untuk pengembangan jemaat (Sudianto, 2022c).

### *Resort Mahakam*

Pengalaman Resort GKE Balikpapan dengan adanya IKN juga dialami Resort GKE Mahakam. Resort GKE Mahakam semakin memfokuskan pelayanan kepada sejumlah jemaat yang lebih sedikit karena pemekaran wilayah Calon Resort Sendawar dan Resort Samarinda. Sebelum kehadiran IKN, Resort Mahakam melayani 9 jemaat, namun sekarang hanya terdiri dari 3 Jemaat. Enam Jemaat lainnya menjadi wilayah pelayanan Calon Resort GKE Sendawar dan Resort GKE Samarinda.

Majelis Resort GKE Mahakam belum mempersiapkan secara terprogram terhadap kehadiran IKN. MPH Resort, sebagai contoh, tidak pernah membicarakan untuk pengadaan aset berupa tanah di sekitar IKN dikarenakan ketiadaan dana dan dianggap masih lumayan jauh dari wilayah Resort. Koordinasi dalam rangka mengantisipasi dampak IKN bersama dengan Resort Samarinda dan Resort GKE Balikpapan juga tidak ada diprogramkan. Padahal Resort Balikpapan mendapat tawaran aset tanah seluas 2 ha oleh Pdt. Analita Migang yang berada di Resort GKE Samarinda. Begitu pula dengan pihak Majelis Sinode GKE tidak ada koordinasi terkait pengadaan aset tanah bagi Resort GKE Mahakam (Sudianto, 2022b).

Menurut Ketua Resort GKE memang tawaran dari pribadi tertentu pernah diutarakan untuk ditawarkan, namun karena harganya murah dan tidak jelas status tanah yang ditawarkan maka pihak Resort GKE Mahakam menolak tawaran tersebut. Sedangkan secara pribadi hanya warga jemaat dari Resort GKE yang membeli tanah di wilayah IKN, persisnya ada lima kepala keluarga yang telah membeli tanah.

Kesiapan Resort GKE Mahakam terwakili melalui diskusi dan *sharing* di pelayanan kategorial seperti Komisi Pelayanan Bapak, Seksi Pelayanan Ibu dan Pemuda/Remaja. Pembicaraan terkait dengan kehadiran IKN yaitu bagaimana memberi memotivasi kaum muda dan warga jemaat agar bisa berpartisipasi dan mempersiapkan diri. Hadirnya IKN juga menjadi percakapan yang serius dimasa kelulusan sekolah di mana ada pesan supaya warga jemaat dan masyarakat tidak hanya menjadi penonton saja.

Dampak lain dari kehadiran IKN terhadap Resort GKE Mahakam yaitu pengembangan jemaat-jemaat baru ke berbagai wilayah Kabupaten Kutai Barat. Resort Mahakam menambah tenaga pelayanan untuk mendirikan Pos Periklanan Injil ke Hulu Mahakam. Pendirian Pos PI ini juga untuk menjangkau ke wilayah perkebunan sawit. Walaupun pemekaran ini justru semakin menjauh dari lokasi IKN, karena arah pemekaran ini justru ke arah Hulu Sungai Mahakam (Sudianto, 2022b).

### ***Analisis: Perubahan GKE sebagai Institusi Agama dengan Kehadiran IKN***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ada beberapa pengertian kata analisis. Pertama, analisis adalah penyelidikan terhadap satu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab duduk perkaranya dan sebagainya) (Http//raharja. Ac.id 2020/11/14 Diakses Tgl. 20 Juni 2022 Jam 21. 40 Wita, n.d.). Analisis berarti juga mengurai yang belum terjabarkan supaya menjadi lebih jelas dan dipahami. Dalam konteks pemahaman seperti itu, maka penulis

berupaya mengurai untuk memperjelas apa yang menjadi sikap dari GKE terhadap kehadiran IKN. Untuk usaha menganalisis ini maka para peneliti berupaya mengungkap data hasil penelitian dengan teori yang sudah ditetapkan untuk penulisan ini. Teori-teori sosial yang terkait dengan perubahan sosial dan juga kaitannya dengan institusi keagamaan akan menjadi kerangka teori utama. Analisis ini dilakukan dari Tingkat Majelis Sinode GKE sampai ke Resort-Resort GKE bahkan jemaat di sekitar wilayah IKN.

#### *Weber dan Peran Lembaga Agama Protestan dalam Kemajuan*

Tingkat sinode sudah merespons kehadiran IKN dengan sangat positif dan sudah baik sebagai fondasi awal GKE untuk merencanakan program selanjutnya guna menunjang kemajuan GKE di wilayah IKN. Dengan meminjam pandangan dari Max Weber mengenai Spirit Kapitalisme yang ada dalam gereja Protestan, secara khusus dalam kelompok Calvinis, Weber melihat kelompok Protestan sangat pintar melihat peluang dan keuntungan dari peristiwa sosial tetapi juga menerapkan *Summon Bonum* yaitu memperoleh keuntungan tetapi menolak kehidupan bebas duniawi (Max Weber, 2006). Tidak bisa dipungkiri bahwa keuntungan ekonomi dan sosial sebagai bagian dari spirit Kapitalismenya Weber juga menjadi pertimbangan GKE dalam melihat peluang di IKN.

Weber juga menekankan aspek penting dalam semangat kapitalisme Protestan yaitu *calling* atau panggilan, yang dianggap sebagai “tanda” atau “sinyal” dalam mereka bertindak hal tersebut dapat kita temukan dalam GPTB GKE:

Investasi akan semakin deras dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Pemerintahan Indonesia. Namun di pihak lain tidak bisa dipungkiri bahwa akan terjadi pergesekan nilai-nilai dan kepentingan, seperti: nilai kearifan lokal atas tanah (tanah ulayat) dan hak kepemilikan tanah. Kehadiran perusahaan tambang dan perkebunan akan sangat berdampak pada perubahan lingkungan baik perubahan iklim maupun perubahan terhadap kondisi alam/hutan. Pasar bebas, pada sisi lain, juga menawarkan berbagai produk barang ataupun jasa yang mungkin lebih bervariasi dan berkualitas. Ini semua menuntut kesiapan berbagai pihak. Dalam keadaan yang belum siap, masyarakat dapat mengalami keterpurukan, yakni terpinggirkan dan ketidakberdayaan. Tercerabutnya hak yang berujung pada pemiskinan (miskin di negerinya sendiri) akan menimbulkan ketidakadilan.

Situasi di atas memanggil gereja berperan besar untuk mendorong dan menyiapkan warganya melalui pelatihan, bimbingan ataupun pendampingan tentang kewirausahaan (*enterpreunership*) agar warga jemaat dapat menjadi pelaku ekonomi yang kreatif dan inovatif, tidak menjadi penonton ataupun objek dari pertumbuhan ekonomi. Gereja juga berkewajiban mendorong warganya untuk tidak dengan mudah menjual lahan miliknya hanya demi uang, dan melainkan memanfaatkan dan mengembangkannya demi kesejahteraan mereka. Demikian juga gereja berperan besar untuk membimbing dan mendampingi warga dan jemaatnya yang menjadi pelaku ekonomi produktif agar dapat melaksanakan tugas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata demi kesejahteraan masyarakat dan bangsa (MS GKE, 2021b).

Max Weber mengidentifikasi agama mempunyai kontribusi katalistik bagi perubahan sosial. Dalam karyanya yang berjudul *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, Weber menguji keterkaitan antara kebajikan (*virtue*) dalam arti kesungguhan dan disiplin kerja dengan resolusi terhadap keselamatan. Efek dari panggilan (*calling*) berimplikasi tumbuhnya kebajikan, yang selanjutnya mempunyai konsekuensi ekonomi dan budaya. Inti tesis Weber dalam *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* ialah bahwa etika Protestan khususnya Calvinisme (seperti kerja keras, hemat, penuh perhitungan, dan profesionalisme) mempengaruhi kebudayaan Barat.

### *Teori Fungsional*

Durkheim mencurahkan banyak waktu selama kariernya untuk menganalisis agama. Ia menunjukkan bagaimana agama sebagai ideologi memiliki kaitan dengan struktur sosial. Dalam karyanya, *The Elementary Forms of the Religious Life*, Durkheim menyatakan bahwa agama merupakan fenomena sosial yang melekat dalam praktik sosial, tidak hanya dalam bentuk kepercayaan-kepercayaan, tetapi juga berfungsi dalam meningkatkan solidaritas sosial sekaligus sebagai sumber kesatuan moral. Durkheim mempertahankan pendapat bahwa simbolisme dalam agama memungkinkan kehidupan sosial berkembang dan masyarakat mereproduksi kebudayaannya sepanjang waktu.

Penting juga agar kita melihat istilah fungsi dan fungsional dalam makna dan fungsi agama. Merujuk kepada teori Fungsional Emile Durkheim, fungsional menunjuk kepada sumbangan yang diberikan agama, atau lembaga sosial yang lain, untuk mempertahankan (keutuhan) masyarakat sebagai usaha-usaha yang aktif dan berjalan terus-menerus. Dengan demikian fokusnya adalah peranan yang dimainkan oleh lembaga agama dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat (Nottingham, 2002). Merujuk kepada GKE sebagai sebuah institusi agama telah memberikan fungsinya dalam masyarakat untuk menjawab kehadiran IKN dengan mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat secara khusus komunitas yang ada dalam lembaganya. Untuk memahami lebih jauh peran dan fungsi keseimbangan yang dimaksud dalam kehidupan masyarakat, maka teori fungsional secara mikro mengingatkan bahwa setiap kelompok dalam konteks masyarakat harus memberi peran dan fungsinya secara proporsional. Sedangkan dalam konteks makro atau masyarakat, Teori Fungsional memandang masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan. Sehingga perubahan salah satu bagian akan mempengaruhi bagian lain, yang akhirnya mempengaruhi kondisi sistem keseluruhan (D. Hendropuspito, 1983).

Pandangan Durkheim tentang Masyarakat sebagai Sistem dalam Keseimbangan bahwa masyarakat merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung. Namun, keseluruhan harus diprioritaskan, karena pengaruhnya lebih besar daripada satu bagian (Pope, 1975). Negara dengan idenya tentang IKN adalah rangkaian sistem yang juga berhubungan dengan bagian atau juga keseluruhan sistem di masyarakat baik itu sosial, budaya dan agama. Dalam hal ini, lembaga agama seperti GKE yang menyadari bahwa pentingnya menjadi bagian dari

sistem yang dibangun negara dengan IKN-nya. karena itu sistem dalam Keseimbangan (*Society as a System in Equilibrium*) menjadi penting bagi GKE dalam keseluruhan proyek IKN. Hubungan timbal balik sangat erat dalam keseluruhan *sui generis* seperti masyarakat. Keseluruhan, bahkan semua realitas, dapat dianggap sebagai sistem.

Kecenderungan Durkheim untuk melihat institusi sosial dalam hal fungsi positif (*positive functions*) dapat ditelusuri ke konsep dasar yang ingin mewujudkan asumsi dasar. "Kehidupan sosial di atas segalanya adalah komunitas usaha yang harmonis, ketika pikiran dan akan bersatu untuk bekerja untuk tujuan yang sama" (Pope, 1975). Ide dirumuskannya GBTP-GKE dengan IKN sebagai salah satu prioritas sudah sampai pada konsep dasar Durkheim fungsi positif (*positive functions*) "ketika pikiran dan akan bersatu untuk bekerja untuk tujuan yang sama", bahasa yang mudah adalah kesamaan ide untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan kehadiran IKN. Dalam hal inilah kenyataan hubungan timbal balik sangat erat dalam keseluruhan *sui generis* seperti masyarakat (dalam kasus penelitian ini kami menggunakan institusi agama). Keseluruhan, bahkan semua realitas, dapat dianggap sebagai sistem "kekuatan yang membatasi dan menahan satu sama lain dalam membuat keseimbangan" "of forces limiting and containing each other making an equilibrium". Dalam hal ini pada tingkat resort seperti Balikpapan, Samarinda, Sendawar dan Balikpapan belum memiliki program yang bisa mendukung semangat dari Majelis Sinode GKE. Sehingga program kerja akan macet karena tidak adanya koordinasi pada tingkat resort tidak ada tindak lanjut pada tingkat jemaat.

Betty R. Scharf melihat Teori Fungsional yang dipengaruhi oleh pandangan Yinger yang berpendapat bahwa fungsi agama adalah untuk menjawab kebutuhan manusia akan nilai-nilai mutlak dan mengenai pegangan hidup terhadap persoalan mendasar manusia seperti misteri hidup dan mati. Agama memberi jawaban akan kebutuhan tersebut, ketika sains atau pengetahuan tidak mampu memberikan jawaban bagi masyarakat modern. Karena semua orang pasti akan menghadapi kematian dan dalam tekanan hidup, maka fungsi dari agama dalam hal ini sangat diperlukan oleh mereka (Betty R. Scharf, 2004). Namun, dilain pihak sistem nilai dan makna dalam agama juga mengalami sekularisasi, dimana agama digambarkan sebagai "produsen" yang bersaing untuk memenuhi kepuasan "konsumen". Dalam hal ini, para ahli agama kehilangan peranan lama sebagai penentu secara otoriter sistem makna "kebenaran". Pada akhirnya mereka menjadi semacam pedagang produk yang memenuhi permintaan para konsumen.

Scharf juga menyandarkan pendapatnya dengan pandangan Berger bahwa agama juga memiliki fungsi sebagai salah satu benteng pertahanan untuk menghadapi anomie (kekacauan) dalam perjalanan hidup manusia. Agama juga mewajibkan agar setiap individu mematuhi nilai-nilai komunitas keagamaan, jika tidak maka fungsi agama akan menjadi lemah. Serta, juga hanya mungkin terjadi jika agama berada dalam sistem nilai yang sama, jika masyarakat dalam sistem nilai yang plural, maka kekacauan tetap akan terjadi. Bahwa agama tidak akan dapat menghindari kekacauan, bahkan justru terkadang menjadi pemicu konflik, sehingga manusia modern memilih untuk menggunakan sistem

nilai lain untuk mengatasi kekacauan tersebut. Beralihnya manusia pada sistem nilai lain di luar agama ini memunculkan gerakan sosial dan politik baru di luar sistem nilai agama.

Luckman, yang berpegang pada Durkheim melihat bahwa pelembagaan agama sebagai yang sakral (kudus) dan profan (duniawi) hanya mungkin terjadi jika memenuhi 3 syarat, yaitu:

1. Kondisi surplus ekonomi dalam masyarakat yang mendukung tokoh agama tersebut. Hal ini terkait dengan kondisi ekonomi komunitas masyarakat secara umum yang memberikan kesempatan kepada tokoh agama untuk berkonsentrasi pada sisi sakral keagamaan, karena sudah terjamin secara ekonomi.
2. Hubungan agama dengan masyarakat dilakukan dengan maksud untuk menumbuhkan rasa kesadaran terhadap sisi sakral agama dan berhasil memupuk sikap pembelaan terhadap nilai-nilai sakral tersebut.
3. Agamawan diharapkan mampu mengembangkan minat yang besar untuk memperluas dan mempertahankan sistem nilai sakral agamanya. Agama lebih dari sekedar "hanya untuk hal yang bersifat liturgis saja", tetapi juga memberikan jawaban atas realitas hidup masyarakat terkini dan tujuan juga hidup mereka.

Scharf, dalam hal ini, menilai bahwa kelemahan fungsi sosial dari agama saat ini bahwa para teolog atau pemuka agama tidak dapat memoralisasikan norma dan nilai sekuler dan menyelaraskannya dengan nilai dan norma agama. Dalam kondisi ini, tindak agama fungsional dalam masyarakat, karena dalam menjawab realitas hidupnya masyarakat tidak ditemukan dalam agama, tetapi pada ideologi atau sistem nilai yang bersifat sekuler (profan) (Imam Santoso, 2011).

Hendropuspito, untuk merespons pemikiran Luckman, melihat bagaimana sebaiknya fungsi agama bagi masyarakatnya sebagai berikut (Hendropuspito, 1984) :

1. Fungsi Edukatif, dalam hal ini agama memiliki tugas mendidik dan memberikan pengajaran. Agama menyampaikan ajarannya melalui para petugasnya, baik dalam upacara keagamaan, khotbah, renungan, pendalaman rohani maupun di luar pelayanan bersifat liturgis. Yang terutama tugas agama adalah mengajarkan dan membimbing manusia untuk memahami makna dan tujuan hidup, hati nurani dan tanggung jawab, Tuhan, hidup kekal, ganjaran, dan hukuman atas perbuatan baik dan jahat.
2. Fungsi Penyelamatan, dalam hal ini semua agama mengajarkan tujuan hidup manusia adalah keselamatan, dan cara-cara yang khas yang dapat menjamin seseorang sampai pada tujuan keselamatan itu. Sebagai makhluk religius, manusia meyakini bahwa manusia sanggup menghadirkan yang sakral atau Tuhan yang suci dalam upacara keagamaan, dan kehadirannya dipahami sebagai yang spontan (*Theophania Spontanea*) dan sebagai yang dimohon (*invokatif*). Dan agama dalam hal ini dipahami sebagai yang mampu mendamaikan yang kehendak yang sakral dan nafsu yang profan, sehingga tujuan penyelamatan itu bisa sampai.
3. Fungsi Pengawasan Sosial, dalam hal ini agama memiliki dua tugas, yakni pertama, sebagai pengawas sosial, yaitu yang menjaga nilai, kaidah susila, memperkukuh larangan atau tabu. Agama juga memberi sanksi kepada yang melanggar dan

mengadakan pengawasan yang ketat pada perilaku umatnya. Kedua, tugas agama sebagai profetik (kenabian) atau fungsi kritis, yang dilakukan atas nama iman atau agama untuk membela yang teraniaya dan menegakkan keadilan atau kemanusiaan. Agama dipahami sebagai ideologi pembebasan manusia dari segala ikatan yang tidak manusiawi, dengan tindakan yang positif dan keikhlasan atau kejujuran tanpa kepentingan politik-ekonomi.

4. Fungsi Memupuk Persaudaraan, dalam hal ini tugas agama adalah menghadirkan damai sejahtera di bumi dan mempersatukan semua golongan dalam satu perjuangan yang sama. Agama mempunyai tugas dalam perpecahan untuk melakukan reintegrasi (penyatuan kembali).
5. Fungsi Transformatif, dalam hal ini agama bertugas mengubah bentuk kehidupan masyarakat lama dalam bentuk baru, dengan mengganti nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru. Nilai-nilai baru ini dimaksudkan untuk membentuk kesadaran manusia akan hakikat hidupnya yang lebih bermartabat.

### ***Perubahan Sosial***

Perubahan sosial adalah fenomena yang dapat menembus ke berbagai tingkat kehidupan sosial. Hal ini terjadi karena keseluruhan aspek kehidupan sosial itu terus menerus berubah. Kebanyakan definisi membicarakan perubahan dalam arti yang sangat luas. Wilbert Moore seperti yang dikutip oleh Robert H. Lauer mendefinisikan perubahan sosial sebagai sebuah perubahan penting dari struktur sosial. Struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial (Robert H. Lauer, 1993). Definisi yang lain juga mencakup bidang yang sangat luas; perubahan sosial didefinisikan sebagai variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial, dan bentuk-bentuk sosial serta setiap modifikasi pola antar hubungan yang mapan dan standar perilaku. Dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah sebuah fenomena yang menembus ke berbagai tingkat kehidupan sosial.

Peneliti melihat kesiapan akan IKN dari teori perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi dalam diri manusia secara individu maupun kehidupan masyarakat secara komunal merupakan salah satu dari gejala perubahan sosial, dari sistem nilai maupun norma, juga termasuk perubahan sikap (*attitude*) dan pola perilaku (*behavior*) (Karl Marx, n.d.). Mengenai perubahan sosial Wilbert Moore, mengungkapkan bahwa perubahan sosial berkaitan dengan perubahan terhadap struktur sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Perubahan Sosial tersebut terjadi dalam masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Hal tersebut merupakan salah satu perubahan sosial berorientasi kepada nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku organisasi, susunan lembaga, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang serta interaksi sosial (Jacobus, 2008). Sama halnya dengan GKE sebagai lembaga keagamaan yang menyadari akan adanya dampak sebuah perubahan sosial yang dihadapi dengan kehadiran IKN. Kesiapan GKE dalam menghadapi IKN haruslah dalam setiap lapisan dalam artian struktur kerja yang ada dalam sistem GKE mulai dari tingkat Sinode, Resort sampai Jemaat.

Dalam teori perubahan sosial, ada beberapa tipe perubahan sosial yaitu, pertama: Perubahan Personal. Hal tersebut berhubungan dengan perubahan peran dan individu-individu baru dalam sejarah kehidupan manusia yang berkaitan dengan keberadaan struktur. Perubahan personal dapat dilihat terhadap perubahan peran dan fungsi individu dalam masyarakat. Misalnya kehadiran IKN akan memberikan peluang kerja yang luas bagi siapa saja baik laki-laki maupun perempuan sehingga IKN akan menjadi magnet bagi masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat untuk membedakan suatu fungsi dan peran ketika seseorang menjalankan tugas sebagai individu yang kreatif.

Kedua, perubahan bagian-bagian struktur sosial yang berhubungan. Perubahan tersebut mengenai kemajuan teknologi, penggunaan sistem dari manual bergeser menjadi sistem komputer yang menuntut kemampuan atau *skill*. Di Era 4.0 apalagi IKN yang baru tentu saja sebagian besar pekerjaan berbasis komputer. Ketiga, perubahan merambah kepada masalah fungsi yang berkaitan dengan fungsi seseorang dalam kehidupan sosial. Misalnya ibu rumah tangga yang fungsi awal merawat anak, kemudian perawatan tersebut bisa beralih kepada pembantu rumah tangga atau lembaga-lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta. Di sini institusi agama seperti GKE bisa membaca sebuah peluang yang akan banyak ditemukan pada IKN baru.

Keempat, perubahan dalam hubungan struktur, di mana dunia pendidikan menyiapkan tenaga kerja industri ada keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha. Kembali institusi agama juga diharapkan bisa membaca situasi ini. Kelima, kemunculan struktur baru dengan adanya perubahan masyarakat. Misalnya dengan adanya perilaku masyarakat yang mengalami perubahan maka muncul sebuah lembaga yang mengatasi sebuah masalah tersebut. Dalam konteks ini, lembaga keagamaan seperti GKE bisa membaca situasi ini.

William F. Ogburn melihat ruang lingkup perubahan sosial mencakup perubahan kebudayaan material dan imaterial, bahwa perubahan kebudayaan material (fisik) mempengaruhi kebudayaan imaterial (non-fisik) (Soekanto, 2014). Melihat konteks IKN di Kalimantan Timur, maka perubahan kebudayaan material berupa penghasilan masyarakat pasti akan mengalami pergeseran, mahalnnya harga tanah di lokasi IKN juga akan merubah pandangan akan nilai tanah dan lahan. Perubahan kebudayaan material (tanah dan uang) membentuk kebudayaan imaterial baru dalam pandangan hidup instan dan komersialisasi. Selain itu, terdapat pola bahwa gejala material mengubah imaterial tidak terjadi dalam hal pemanfaatan hasil kerja, tetapi terjadi sebaliknya material berubah tetapi imaterial bersifat tetap. Dalam masyarakat sub sistem, pendapatan (material) hari ini akan habis hari ini, yang membentuk konsep bahwa tanah sebagai yang menyediakan kehidupan akan menyediakan rezeki untuk esok hari (imaterial). Dalam hal ini tidak prinsip investasi. Gereja harus mendampingi jemaat dan masyarakat agar bisa memanfaatkan tanah-tanah mereka yang masuk dalam lingkungan IKN sebaik mungkin begitu pula dengan tanah dan lahan gereja.

Talcott Parsons menyampaikan empat fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah sistem (sistem yang dimaksud di sini adalah lembaga) agar mampu bertahan menghadapi perubahan sosial, yaitu (Robert H. Lauer, 1993):

1. Adaptasi (*adaptation*): Sebuah sistem harus mampu menanggulangi situasi dari luar. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan menghasilkan komoditas untuk redistribusi sosial.
2. Pencapaian tujuan (*Goal Attainment*): Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Pemecahan permasalahan politik dan sasaran-sasaran sosial adalah bagian dari kebutuhan ini.
3. Integrasi (*integration*): Sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus dapat mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya.
4. Pemeliharaan Pola (*latency*): Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Keempat fungsi tersebut dikenal dengan sebutan AGIL yaitu Adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan latensi atau pemeliharaan pola (*latency*). Pertama adaptasi, fungsi adaptasi yaitu dengan cara menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. Sedangkan fungsi pencapaian tujuan atau *goal attainment* difungsikan oleh sistem kepribadian dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya untuk mencapainya. Fungsi integrasi dilakukan oleh sistem sosial, dan laten difungsikan sistem kultural. Sistem kultural bekerja untuk memotivasi aktor supaya bertindak dengan seperangkat norma dan nilai. Keempat fungsi ini menghubungkan antara struktur dan proses. Jika kita melihat proses di dalam dan antar sistem, harus dilihat dari sudut keempat fungsi tersebut sekaligus merupakan inti struktural dari setiap sistem sosial.

### **Implikasi**

Perubahan sosial, ekonomi dan budaya atas berdirinya IKN baru dan pembangunan fasilitas penunjang IKN akan berimbas pada masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. GKE sebagai institusi agama yang ada di Kalimantan melihat hal tersebut juga sebagai sebuah peluang yang positif, walaupun tidak juga menafikan bahwa akan ada persoalan negatif juga yang akan mengikutinya. Persoalan negatif ini seperti kecenderungan berkembangnya materialisme dan hedonisme, lunturnya solidaritas sosial dan ikatan kekeluargaan, berkembangnya budaya instan dalam dunia bekerja, melemahnya tanggung jawab dalam memelihara alam serta tergerusnya nilai-nilai imaterial dengan isu lingkungan. Berangkat dari kompleksitas masalah yang muncul tersebut, maka bagian refleksi teologis ini dibangun sebagai panduan teologis sejauh mana kesiapan dari GKE dalam menyambut agar dapat merevitalisasi kembali nilai-nilai budaya dan spiritual demi kehidupan yang lebih bijak, lebih layak, dan lebih seimbang.

### *Penciptaan dan Tanggung Jawab Manusia*

Allah sendiri menyertakan berkat-Nya kepada manusia dalam menjalankan mandat memelihara ciptaan Allah (Kejadian 1:26-28). Dalam konteks ini harus disadari bahwa status dan hak istimewa manusia itu harus dimengerti dalam terang konteks mandat serta pendelegasian sebagian dari kekuasaan Allah untuk memelihara kesejahteraan dan keutuhan ciptaan-Nya. Di sinilah letak legalitas kekuasaan manusia atas alam semesta, serta di sini pula letak batasan dan kendali kekuasaan manusia tersebut. Alam semesta dikaruniakan kepada manusia untuk dimanfaatkan guna menunjang dan melengkapi hidupnya secara bertanggung jawab.

Keyakinan iman Kristen terhadap penciptaan yang bersandar pada kitab Kejadian tersebut, juga menyebutkan bahwa Allah sesudah selesai dalam karya penciptaan itu tidak lalu meninggalkan dan membiarkan ciptaan itu berjalan dan berkembang sendiri, melainkan tetap melanjutkan karya pembangunan-Nya dengan memelihara ciptaan-Nya dengan penuh kasih sayang. Di tengah seluruh alam semesta yang diciptakan oleh Allah itu, manusia diciptakan dan ditempatkan pada posisi dan status yang fungsional dalam hubungannya dengan alam semesta. Hal ini jelas dari proses penciptaan manusia, yaitu ia diciptakan oleh Allah dengan memadukan unsur-unsur materi dan non-materi baik dari Allah dan alam. Manusia diangkat sebagai partner Allah dalam merawat ciptaan. Secara eksplisit, manusia juga dinyatakan sebagai imago Dei, dan sebagai imago Dei manusia menerima tugas khusus yaitu untuk menguasai alam, untuk berbudaya serta membangun alam semesta ini.

Aspek teologi penciptaan dalam Kejadian memandatkan GKE dalam mendukung proyek IKN sesuai dengan kehendak Allah. GKE dimandatkan dan didelegasikan Allah untuk memelihara kesejahteraan dan keutuhan ciptaan-Nya. Hal ini selaras dengan visi GKE yaitu mewujudkan langit baru dan bumi yang baru.

### *Ketaatan Abraham dan Perubahan Sosial*

Hal pertama adalah perubahan lingkungan sosial, dalam Alkitab Secara khusus Perjanjian Lama. Tokoh Alkitab yaitu bapak orang beriman Abraham, diminta oleh Allah untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya Ur Kasdim dan mempersiapkan lingkungan sosial yang baru di tanah perjanjian yaitu Tanah Kanaan (Marvin R. Wilson, 1989). Inti kisah itu adalah iman Abraham, seperti yang terlihat dalam panggilannya. Panggilan kepada Abraham bersifat radikal: ia harus meninggalkan akar-akarnya - negeri, sanak saudara dan keluarga dekatnya (Kejadian 12:1) untuk pergi ke tempat yang tidak pasti, "negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu". Setelah pemanggilan itu, penulis dengan sederhana menyuguhkan respons Abraham: "Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya" (ay 4). Abraham ditampilkan sebagai teladan iman; hal pertama yang dikatakan tentang dirinya adalah ketaatan dan kepercayaannya kepada Allah yang memanggilnya. Di sini penulis bergumul dengan masalah iman dan hubungannya dengan kebenaran, sebagaimana dapat dilihat juga dalam Kejadian 15:6: "Lalu percayalah Abram kepada TUHAN, maka TUHAN memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai

kebenaran". Pentingnya ayat ini bukan dilihat dalam bagian kisah mengenai apa yang terjadi antara Allah dengan Abraham (ay 1-5), tetapi dalam rangkuman penulis Kejadian ingin menyampaikan bahwa kebenaran Abraham ialah kepercayaannya, yakni ia beriman akan janji Allah (W.S. LaSor, 2001).

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur adalah sebuah program besar pemerintah Indonesia dan GKE memberikan respons positif dengan menjadikannya salah satu program prioritas GKE, kita menyadari akan adanya potensi besar akan baik itu perkembangan dan juga dinamika sosial yang akan muncul. GKE bukan hanya menyadari akan keuntungan yang didapatkan GKE karena sudah memiliki gereja di wilayah IKN yang diharapkan nanti mampu menjadi rumah pembinaan iman dan spiritual bagi orang-orang Kristen di IKN tetapi juga menjadi wadah perjuangan perlindungan hak-hak bagi masyarakat atas dampak perubahan sosial. Ketaatan Abraham dan sikap tunduk pada perintah Allah dijadikan sebagai refleksi atas kesiapan GKE dalam menghadapi perubahan sosial yang harus disikapi, dengan berpegang teguh pada Firman Tuhan dimana GKE siap menjadi bagian dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

#### *Keluaran dan Pembangunan Allah*

Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir sering diidentikkan dengan peristiwa penciptaan baru Allah, yang juga merupakan tindakan pembangunan (Yesaya 51:9,10). Kata kerja yang dipakai untuk penciptaan adalah sama dengan yang dipakai untuk pengeluaran yaitu bara (אָרָה), yang hanya dipakai khusus oleh Allah (Yesaya: 1:15). Melalui tindakan Allah yang membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, Allah membebaskan bangsa itu sekaligus juga membangun "a just and comradely society", dari yang "*disorder*" menjadi "*new order*" (Keluaran 13,3; 1:10-11); 5:6-14; 3:7-10). Sesudah Israel menjadi suatu bangsa yang mandiri, sebagai bangsa pilihan Allah, maka berkali-kali pula Allah melakukan pembangunan atas bangsa tersebut, misalnya pada masa pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo, juga pada masa Raja Yosia, masa Nabi Ezra dan Nabi Nehemia; baik pembangunan secara fisik maupun secara mental dan spiritual. Berkaca dari itu maka GKE juga punya tanggung jawab dan berpartisipasi dalam pembangunan di IKN baru di Kalimantan Timur, baik membangun spiritualitas jemaat maupun mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

#### *Kematian Kristus dan Penciptaan Kembali*

Penciptaan Allah adalah penciptaan "kosmos" dari "*chaos*", yang membangun suatu bangsa yang terpilih yaitu Israel serta berkarya di dalam dan melalui bangsa pilihan tersebut, itu merupakan karya awal penyelamatan Allah. Selanjutnya karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus merupakan sebuah pemenuhan (*fulfillment*) atas apa yang telah Allah lakukan sebelumnya. Sekaligus juga penyelamatan itu diyakini sebagai penciptaan kembali (*re-creation*) secara khusus terlihat dalam prolog kitab Yohanes (Dodd, 1953). Karya Yesus Kristus adalah penciptaan baru. Dalam arti yang seperti itu Paulus berbicara mengenai "ciptaan baru di dalam Kristus" (Galatia 6:15, II Korintus

5:17). Lebih dari itu, melalui ciptaan baru dalam Kristus ini, maka penciptaan yang semula itu mencapai maksud yang sebenarnya (Roma 8). Karya Kristus yang mengampuni dan membebaskan manusia dari dosa (beserta segala akibatnya: ketidakadilan, kebencian dan sebagainya), itu menciptakan umat Manusia yang baru yang meliputi seluruh humanitas/kemanusiaan.

Manusia yang merupakan puncak dan pusat penciptaan itu terpanggil untuk melanjutkan penciptaan itu di dalam seluruh hidupnya melalui segala upayanya (Kejadian 1:28). Dengan bekerja, mentransformasikan dunia, melawan ketidakadilan dan perampasan hak serta kesewenang-wenangan, membangun masyarakat yang adil, dan dengan demikian tujuan dari penciptaan dalam arti yang lebih luas bisa tercapai. Pembangunan yang dimaksud di sini ialah perubahan sosial yang sebesar-besarnya untuk membebaskan manusia dan masyarakat dari keadaan yang menurunkan kehormatan dan martabatnya. Mengubah masyarakat seperti itu, tidak hanya mencakup segi-segi sosial, ekonomi, politik dan sebagainya bersama-sama dengan struktur-struktur kemudian juga mencakup cara berpikir, pola tingkah laku dan bahkan juga nilai-nilai yang berlaku akan mengalami perubahan secara sosial.

Oleh karena itu maka perlu adanya penyesuaian-penyesuaian, artinya mengevaluasi warisan nilai-nilai lama dan nilai-nilai baru. Dengan kata lain agama (dan kebudayaan) ditantang guna menghadapi akibat dari perubahan sosial yang akan terjadi akibat dari IKN baru. Lembaga agama seperti halnya GKE diharapkan memberikan andilnya. Bagi umat Kristen, maka yang harus dilakukan ialah "kembali ke Kitab Suci", dan melihat apa yang dikehendaki oleh Allah bagi alam semesta dan bagi manusia. Hal ini, tentu juga penting bagi GKE, yang di dalam kehidupannya ternyata lembaga agama masih mempunyai peranan yang sangat vital.

## **Kesimpulan**

### *Kesiapan Jemaat*

Kehadiran IKN yang baru di Kalimantan Timur, ditanggapi dengan cara yang sangat positif oleh lembaga keagamaan seperti GKE, tentu saja ada peluang yang dilihat di sana di mana Kalimantan Timur dan lokasi IKN bersentuhan langsung dengan GKE, ada setidaknya empat (4) resort dan dua jemaat masuk dalam zona pembangunan IKN baru. Potensi GKE dalam pembangunan IKN baru, tentu saja dengan pro aktifnya GKE memperlihatkan eksistensi dan programnya, walaupun harus diakui bahwa dari segi fasilitas di lokasi IKN masih belum memadai. Untuk tingkat Sinode sudah memiliki dasar dimana ada "Cetak Biru" dari pembentukan persiapan GKE untuk IKN baru sehingga landasan untuk memperkuat posisi GKE di IKN baru sudah jelas arahnya. Untuk tingkat resort bisa kita lihat ada beberapa resort yang menaruh perhatian mengenai IKN namun belum terprogram dengan baik. Pada tingkat jemaat dan lapangan harus dilakukan pendampingan dan juga ada studi akademis untuk melihat potensi apa saja yang bisa GKE lakukan.

### *Fungsi GKE sebagai Lembaga Agama*

Teori Fungsional Durkheim mengenai fungsi lembaga masyarakat termasuk juga lembaga agama bisa memberikan keseimbangan antara aktivitas sosial dan juga spiritual sehingga agama memiliki fungsi yang luas di tengah masyarakat. GKE sebagai sebuah lembaga sudah berusaha seoptimal mungkin pada tingkat Sinode dalam mempersiapkan dasar agar bisa menjadi bagian dari lingkaran pembangunan IKN baru. Namun fungsi ini pasti tidak akan berjalan dengan benar kalau koordinasi pada tingkat pelaksana lapangan tidak dipantau.

Bercermin dari fungsi agama bagi masyarakatnya dari Hendropuspito, GKE bisa meningkatkan fungsi keagamaannya dalam berbagai program dan aktivitas:

1. Fungsi Edukatif, GKE memiliki tugas mendidik dan memberikan pengajaran. GKE menyampaikan ajarannya melalui para petugasnya, baik dalam upacara keagamaan, khotbah, renungan, pendalaman rohani maupun di luar pelayanan bersifat liturgis. Yang terutama tugas agama adalah mengajarkan dan membimbing manusia untuk memahami makna dan tujuan hidup, hati nurani dan tanggung jawab, Tuhan, Hidup Kekal, ganjaran dan hukuman atas perbuatan baik dan jahat. Tentu inilah tugas GKE yang paling mendasar dalam pelayanannya secara khusus juga di IKN baru.
2. Fungsi Penyelamatan, GKE mengajarkan tujuan hidup manusia adalah keselamatan, dan cara-cara yang khas yang dapat menjamin seseorang sampai pada tujuan keselamatan itu. Sebagai makhluk religius, manusia meyakini bahwa manusia sanggup menghadirkan yang sakral atau Tuhan yang suci dalam upacara keagamaan, dan kehadirannya dipahami sebagai yang spontan (*Theophania Spontanea*) dan sebagai yang dimohon (*invokatif*). GKE dalam hal ini dipahami sebagai yang mampu mendamaikan yang kehendak yang sakral dan nafsu yang profan, sehingga tujuan penyelamatan itu bisa sampai. Fungsi ini tentu saja bersifat holistik atau menyeluruh sehingga GKE bisa menjadi penyeimbang.
3. Fungsi Pengawasan Sosial, GKE memiliki dua tugas, yakni pertama, sebagai pengawas sosial, yaitu yang menjaga nilai, kaidah susila, dan memperkukuh larangan. GKE mempunyai fungsi memberi sanksi kepada yang melanggar dan mengadakan pengawasan yang ketat pada perilaku umatnya. Kedua, tugas profetik (kenabian) GKE yang dilakukan atas nama iman untuk membela yang teraniaya dan menegakkan keadilan atau kemanusiaan. GKE mempunyai fungsi sebagai ideologi pembebasan manusia dari segala ikatan yang tidak manusiawi, dengan tindakan yang positif dan keikhlasan atau kejujuran tanpa kepentingan politik-ekonomi. Ini adalah fungsi yang sangat vital bagi GKE di tengah IKN baru di Kalimantan Timur.
4. Fungsi Memupuk Persaudaraan, GKE menghadirkan damai sejahtera di wilayah IKN dan mempersatukan semua golongan dalam satu perjuangan yang sama. GKE mempunyai fungsi re-integrasi dalam perpecahan dan fungsi integrasi dalam potensi perpecahan. Upaya rekonsiliasi sesama umat beragama juga menjadi agenda penting bagi GKE.

5. Fungsi Transformatif, GKE bertugas mengubah bentuk kehidupan masyarakat lama dalam bentuk baru, dengan mengganti nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru. Nilai-nilai baru ini dimaksudkan untuk membentuk kesadaran manusia akan hakikat hidupnya yang lebih bermartabat. Fungsi GKE yaitu membangun resort dan jemaat yang mampu berpegang pada fungsi yang transformatif yang bisa menjawab kebutuhan serta tantangan yang dibutuhkan dalam konteks IKN baru.

#### *Keniscayaan IKN sebagai Sebuah Perubahan Sosial*

Pandangan Bellah yang bersandar pada Weber memberikan ciri-ciri agama-agama modern: dimana adanya usaha-usaha dalam mencari standar tindakan moral yang juga sekaligus usaha dalam mencapai kematangan pribadi serta tanggung jawab sosial dalam merespons perubahan sosial. Meminjam fungsi agama dalam menjawab perubahan sosial milik Talcott Parsons yang ia sebut dengan metode AGIL yaitu Adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan latensi atau pemeliharaan pola (*latency*). Keempat fungsi ini menghubungkan antara struktur dan proses. Jika kita melihat proses di dalam dan antar sistem, harus dilihat dari sudut keempat fungsi tersebut sekaligus merupakan inti struktural dari setiap sistem sosial. Perubahan sosial pasti akan terjadi dalam pembentukan IKN baru, tindakan responsif yang sudah dilakukan oleh Majelis Sinode GKE dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung terbentuknya GKE di wilayah IKN baru sudah jelas, dan eksistensi GKE di sana sudah nyata di mana terdapat dua gereja GKE dalam zona wilayah IKN baru.

Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus dipersiapkan oleh GKE ke depan di tengah keniscayaan perubahan sosial kehadiran IKN. Sebaiknya harus ada tindak lanjut yang nyata dengan melibatkan banyak pihak. Dalam kerangka visioner dan sosial ini, maka rekomendasi yang ditawarkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Membentuk tim khusus GKE dalam mempersiapkan dan mengembangkan aset-aset GKE yang ada di wilayah IKN baru.
2. Membangun jejaring dengan lembaga negara, swasta dan swadaya masyarakat baik regional, nasional maupun internasional dalam mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh GKE dalam mendukung pengembangan GKE di wilayah IKN baru.
3. Melaksanakan studi akademis yang komprehensif untuk melihat potensi apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh GKE di wilayah IKN baru.
4. Mendirikan Pusat Pelatihan Kemandirian Jemaat Secara Terpadu: GKE agar jemaat di lingkungan IKN baru memiliki pusat pelatihan sebagai wadah yang secara konsisten melatih dan mempersiapkan jemaat dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dapat diaplikasikan secara nyata dalam memaksimalkan segala potensi yang ada menuju kepada kemandirian GKE dalam menghadapi IKN baru
5. Melakukan revitalisasi Gedung-gedung gereja di Resort, Calon Resort dan Jemaat GKE di kawasan IKN. Revitalisasi tersebut sebaiknya dilakukan sesegera mungkin, sehingga gedung gereja GKE yang ada menjadi tujuan jemaat Kristen di IKN baru.

6. Melakukan pendampingan secara berkala untuk melihat dan terkoordinasi agar progres dari pada pengembangan GKE di wilayah IKN bisa terus terlihat secara nyata.
7. Mengembangkan Proyek GKE Jangka Menengah dan Jangka Panjang di IKN baru sehingga kehadiran dan pengembangan GKE di sana menjadi proyek mercusuar gereja Tuhan ke depan.

Pembangunan jemaat GKE dalam menyikapi terbentuknya IKN baru adalah proses yang berlangsung secara berkesinambungan. Pengamatan, penguatan komitmen untuk berubah, mempersiapkan dan melakukan penelitian, analisis masalah, refleksi teologis dan perencanaan strategis berlanjut kembali dalam evaluasi (pengamatan dan seterusnya). Seluruh proses dalam pembangunan jemaat kontekstual dapat digambarkan sebagai berikut: Proses transformasi dalam pembangunan jemaat akan terjadi terus-menerus seperti yang digambarkan dalam model sistem terbuka. Lembaga keagamaan harus terus melakukan proses dialog secara kritis dengan diri sendiri dan juga dengan konteks masyarakat sambil terus menggumuli kehendak Allah dengan konteks yang berbeda serta menjawab kebutuhan jemaat. Proses tersebut harus dilakukan oleh lembaga GKE secara kontekstual tidak boleh berhenti dalam sebuah titik kepuasan. Kesediaan GKE sebagai lembaga untuk terus berproses dalam gerak menyikapi perubahan menjadikan kehidupan jemaat dinamis dan tidak stagnan, terus mencari kehendak Allah dalam perjalanan dan karya gereja serta memberi dampak dalam kehidupan masyarakat dan eksistensi GKE ke depan.

#### Daftar Pustaka

- Betty R. Scraft. (2004). *Sosiologi Agama*. Kencana.
- D. Hendropuspito. (1983). *Sosiologi agama*. In *Yayasan Kanisius*. Yayasan Kanisius.  
<http://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=11242>
- Dodd, C. H. (1953). *The Interpretation of the Fourth Gospel*. Cambridge University Press.
- Hadi Saputra. (2022). *Wawancara Pdt. Andrian K. Iriawan via WhatsApp, 10 Mei 2022*.
- Hendropuspito. (1984). *Sosiologi Agama*. Kanisius.  
[http://raharja.ac.id/2020/11/14/diakses tgl. 20 Juni 2022 jam 21. 40 Wita](http://raharja.ac.id/2020/11/14/diakses%20tgl.%2020%20Juni%202022%20jam%2021.%2040%20Wita). (n.d.).
- Imam Santoso. (2011). *Sosiologi, The Key Concepts*. PT. RadjaGrafindo Persada.
- Jacobus, R. (2008). *Perubahan Sosial dalam Teori Makro : Pendekatan Realitas Sosial*. Alfabeta.
- Karl Marx. (n.d.). *Naskah - naskah Ekonomi dan Filsafat 1844 (terj)*. Hasta Mitra.
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Buku-Saku-Ikn-072121. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia*, 2–24.
- Kinurung Maleh. (2022a). *Saat mendampingi Sek Jend UEM Volker Martin Daily, 1 Mei 2022*.
- Kinurung Maleh. (2022b). *Wakil Ketua Majelis Sinode GKE*.
- Majelis Sinode GKE. (2022). *Almanak GKE 2022* (pp. 93–94). MS GKE Banjarmasin.
- Marvin R. Wilson. (1989). *Our Father Abraham: Jewish Roots of the Christian Faith*. Eerdsman Publishing Company.
- Max Weber. (2006). *Etika Protestan & Spirit Kapitalisme*. Pustaka Pelajar.  
<https://pustakapelajar.co.id/buku/etika-protestan-spirit-kapitalisme/>

- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Remaja Rosdakarya.  
<http://library.stik-ptik.ac.id>
- MS GKE. (2021a). *Daftar Keputusan Sinode Umum XXIV GKE Tanggal 6-9 Juli 2021*.
- MS GKE. (2021b). *GPTP-GKE 2015-2040 dan 2021-2026*.
- Nottingham, E. K. (2002). *Agama dan masyarakat : suatu pengantar sosiologi agama* (8th ed.). PT. RadjaGrafindo Persada.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=169239>
- Pope, W. (1975). Durkheim as a Functionalist. *Sociological Quarterly*, 16(3), 361–379.  
<https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1975.tb00954.x>
- Robert H. Lauer. (1993). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. P.T. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Sudianto. (2022a). *Wawancara dengan Missionaris asal Korea Selatan dan MPH Sinodes di STT GKE. Banjarmasin, 14 Juni 2022*.
- Sudianto. (2022b). *Wawancara dengan Pdt. Wotalini Via WhatsApp, 20 Juni 2022*.
- Sudianto. (2022c). *Wawancara pdt. Veven Santosa, menggunakan WhatsApp, 17 Mei 2022*.
- Sudianto. (2022d). *wawancara via Whatsapp dengan Pdt. Bersy 17 mei 2022*.
- Sudianto dan Hadi Saputra. (2022a). *Wawancara Pdt.Andrian K. Iriawan*.
- Sudianto dan Hadi Saputra. (2022b). *Wawancara Pdt.Kinurung Maleh*.
- W.S. LaSor. (2001). *Pengantar Perjanjian Lama 1: Taurat dan Sastra* (7th ed.). BPK Gunung Mulia.
- Wirawan, I. B. (1991). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. 402.